



**WEWENANG KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM  
MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN DI KOTA JAYAPURA**

*The Authority Of The Tax Service Office In Following Up On The Findings  
Supreme Audit Agency In Jayapura City*

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**Marthina Yaboisembut  
NIM : 202202515044**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**WEWENANG KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM  
MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN DI KOTA JAYAPURA**

*The Authority Of The Tax Service Office In Following Up On The Findings  
Supreme Audit Agency In Jayapura City*

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal 27 Juni 2024

Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Dr. Yusak E.Reba, S.H.,M.H**  
NIP. 19750210 200112 1 003

**Pembimbing II**



**Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H**  
NIP. 19560618 198902 1 001

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19660302 199303 1 002

## PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 01 Juli 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota Dr. Yusak E.Reba, S.H.,M.H  
NIP. 19750210 200112 1 003



(.....)

Sekretaris/Anggota Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H  
NIP. 19590618 198902 1 001



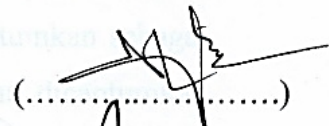
(.....)

Anggota Dr. Josner Simanjuntak, S.H.,M.Hum  
NIP. 19641216 199102 1 002



(.....)

Anggota Dr. Marudut Hasugian, S.H.,M.Hum  
NIP. 19641211 199303 1 002



(.....)

Anggota Dr. Lily Bauw, S.H.,M.Hum  
NIP. 19660515 199303 2 002



(.....)

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marthina Yaboisembut

NIM : 202202515044

Judul : Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam Menindaklanjuti  
Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Jayapura

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 01 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Marthina Yaboisembut  
NIM 202202515044

## ABSTRAK

**Marthina Yaboisembut.** “Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Di Kota Jayapura”., dibimbing oleh: Yusak E. Reba sebagai pembimbing I dan Victor Th. Manengkey sebagai pembimbing II.

**Metode Penelitian** yang digunakan fokus pada penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang didapat dari laporan serta dokumen, penelitian-penelitian terdahulu mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber literatur lainnya. Bahan yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1) Bagaimana pelaksanaan wewenang Kantor Pelayanan Pajak dalam mengungkap pajak terutang di wilayah Kota Jayapura?; 2) Bagaimana kedudukan Kantor Pelayanan Pajak dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?. **Tujuan penelitian** untuk 1) mengetahui Kantor Pelayanan Pajak dalam mengungkap pajak terutang di Kota Jayapura; dan untuk mengetahui Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. **Hasil penelitian** ini menemukan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang Kantor Pelayanan Pajak telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra DJP dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga hasilnya pada tahun 2021 dan 2022 DJP mampu mencapai target penerimaan yang diamanatkan dalam APBN. Dalam hal pemeriksaan terkait pengelolaan pajak, BPK tidak berwenang memberikan rekomendasi kepada KPP dalam hal ini Account Representative, karena pengelolaan pajak memiliki cara pemungutan dan perhitungannya sendiri. Dari segi teoretis, wewenang yang diberikan kepada BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan terlalu luas sehingga yang seharusnya menjadi tugas BPK tidak dilakukan dengan baik.

*Kata Kunci : Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan, Wewenang, Pajak*

## **ABSTRACT**

**Marthina Yaboisembut.** *“The Authority of the Tax Office in Following Up the Findings of the Supreme Audit Agency in Jayapura City”*. Supervised by: Yusak E.Reba as first supervisor and Victor Th. Manengkey as second supervisor.

The **research method** used focuses on normative legal research using a statutory approach, which is sourced from primary legal materials, secondary legal materials, by collecting and studying data and information obtained from reports and document, previous studies on books, laws and regulations, journals and other literature sources. The materials obtained were the processed using qualitative analysis by explaining the existing data with statements not with numbers. Furthermore, two main issues were selected: 1) How is the implementation of the authority of the Tax Service Office in disclosing taxes payable in the Jayapura City area?; 2) How is the position of the Tax Service Office in following up the results of the audit of the Supreme Audit Agency? **The purpose of the research** is to find out the Tax Office in disclosing taxes payable in Jayapura City; and to find out the Tax Office to follow up the results of the audit of the Supreme Audit Agency. **The results of this study** found that the KPP Pratama has the task of carrying out service, education, supervision, and law enforcement of taxpayers in the fields of Income Tax, Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods, Other Indirect Taxes, and Land and Building Taxes, and carrying out control of information on tax subjects and objects within its management and responsibility of state finances carried out by central government, local governments, other state institutions, Bank Indonesia, State Owned Enterprises, Public Service Agencies, Regional Owned Entreprises, and other institutions or agencies that manage state finances. The authority of the Tax Office has been carried out in accordance with tax laws and regulations, so that as a result in 2021 and 2022 the DJP was able to achieve the revenue target mandated in the APBN. In terms of audits related to tax management, BPK is not authorised to provide recommendations to Tax Office, in this case the Account Representative, because tax management has its own collection and calculation methods. From a theoretical point of view, the authority given to BPK in conducting audits of financial management and financial responsibility is too broad so that what should be the task of BPK is not carried out properly.

*Keywords: Tax Service Office, Supreme Audit Agency, Authority, Taxe*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

“Perubahan itu sesuatu yang pasti. Jika tidak mengikuti perubahan, maka akan tergerus oleh perubahan”

Kupersembahkan Kepada:

Dengan Penuh Kerendahan Hati Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang Tua terkasih
3. Kakak dan Adikku tercinta
4. Teman-temanku
5. Teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum
6. Almamaterku Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan berkatNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam Menindaklanjuti Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Kota Jayapura” sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasi Jayapura.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc, selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Yusak E. Reba, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Victor Th. Manengkey, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting kepada Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan selama Penulis menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.

6. Kedua Orang Tua yang telah beristirahat dalam tidur panjang, yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dan doa Orang Tualah yang mengiringi setiap langkah kehidupan Penulis.
7. Kepala KPP Pratama Jayapura dan Kepala Seksi Pengawasan atasan langsung Penulis, atas pengertiannya sehingga Penulis bisa menyelesaikan kuliah.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan Tesis ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan perkembangan bagi dunia akademisi.

Jayapura, Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PELAKSANAAN UJIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	iii
<b>PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penulisan.....	10
<b>BAB II</b> .....	13
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Badan Pemeriksa Keuangan.....	13
B. Keuangan Negara.....	17
C. Dasar – Dasar Perpajakan.....	25
D. Landasan Teori.....	32
E. Kerangka Pikir .....	46
F. Bagan Kerangka Pikir .....	47
G. Definisi Operasional.....	48
<b>BAB III</b> .....	50
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Sumber Bahan Hukum .....	52
D. Teknis Pengumpulan Bahan .....	53

E. Analisa Bahan .....	53
<b>BAB IV</b> .....	54
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	54
A. Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Dalam Mengungkap Pajak Terutang di Wilayah Kota Jayapura .....	54
B. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.....	97
<b>BAB V</b> .....	117
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119